

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN TANGERANG MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN BERBASIS BUDIDAYA TAMBAK DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN TANGERANG

ACCELERATION OF DEVELOPMENT OF IN THE COASTAL AREAS OF TANGERANG REGENCY THROUGH THE DEVELOPMENT OF THE MINAPOLITAN AREA BASED ON FISHPOND AQUACULTURE IN THE COASTAL AREA OF TANGERANG REGENCY

Kasman¹, Tigoh Kurnia Mursa¹, & Dini Purbani²

¹Program Magister Teknik Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah
Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana

²Badan Pusat Riset Kelautan BRSDMKP- KKP
Jalan Pusir Putih 1 Ancol Timur, Jakarta

e-mail : uzai2206@gmail.com

Diterima tanggal: 23 Februari 2022 ; diterima setelah perbaikan: 24 April 2022; Disetujui tanggal: 19 Mei 2022

ABSTRAK

Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan dengan tujuan agar dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah. Namun harapan tersebut belum dapat terwujud mengingat konsep pengembangan minapolitan di Kawasan ini belum dirumuskan dengan baik. Penelitian ini bertujuan merumuskan konsep pengembangan minapolitan di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang sehingga terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode analisis LQ, analisis *Shift Share*, analisis regresi berganda, SPSS, Metode Hayami, Metode Indeks Sentralitas, dan *overlay* peta. Pengumpulan data dilakukan dengan model eksploratif data primer melalui observasi lapangan dan wawancara secara random sampling. Hasil analisis menunjukkan ada tujuh kecamatan yang bisa menjadi bagian kawasan minapolitan, dengan pusat minapolitan terpilih adalah Kecamatan Kronjo dan Teluknaga. Usaha perikanan yang potensial untuk dijadikan sektor unggulan adalah usaha perikanan Kawasan Minapolitan di wilayah studi dapat dikembangkan dengan memaksimalkan budidaya tambak, dengan komoditas utamanya adalah bandeng dan mujair. Percepatan pembangunan wilayah pesisir dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi budidaya tambak bandeng, serta budidaya tambak mujair (luas lahan, benih, pakan, tenaga kerja, dan pupuk), serta peningkatan nilai tambah produksi. Selain itu sarana prasarana pendukung kegiatan budidaya seperti ketersediaan PPI, lembaga keuangan, dan sarana prasarana wilayah lainnya juga menjadi faktor penentu keberhasilan minapolitan di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis kesesuaian lahan menunjukkan bahwa potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan budidaya tambak mencapai 8.215,43 Ha. Dengan menerapkan hasil penelitian ini dalam pengembangan kawasan Minapolitan, diharapkan dapat mempercepat percepatan pembangunan Kawasan Minapolitan di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang dapat terwujud.

Kata kunci: Percepatan Pembangunan, Kawasan Minapolitan, Perikanan Tambak, Sektor Unggulan, Wilayah Pesisir.

ABSTRACT

The purpose of this research study aims is to formulate the concept of developing Minapolitan Area development in the coastal area of Tangerang Regency by optimizig fishpond aquaculture activities. to accelerate development. This research uses LQ analysis, Shift Share analysis, multiple regression analysis, SPSS, Hayami Method, and Centrality Index Method and map overlay. The results of the analysis show that there are seven sub-districts that can become minapolitan areas, with the selected minapolitan centers being Kronjo and Teluknaga. Fisheries business that has the potential to become a leading sector is aquaculture, with the main commodities being milkfish and tilapia. There are seven sub-districts that can be part of the Minapolitan area, with the selected minapolitan centers being Kronjo and Teluknaga. The Minapolitan area can be developed by aquaculture activities with the main commodities being milkfish and mujair. The development of the Minapolitan area can be done through increasing production capacity (land area, seeds, feed, labor, and fertilizer), and increasing added value. In addition, supporting infrastructure for cultivation activities such as the availability of PPI,

financial institutions, and other regional infrastructure facilities are also a determining factor for the success of Minapolitan in Tangerang Regency. Land potential suitable for aquaculture activities reaches 8,215.43 Ha.

Keywords: *Accelerated Development, Minapolitan Area, Fish Ppond Fisheries Aquaculture, Leading Sector, Coastal Region.*

PENDAHULUAN

Dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya wilayah pesisir di Indonesia secara optimal dan berkelanjutan, Pemerintah telah mendorong pengembangan wilayah dengan menetapkan kawasan minapolitan. Penetapan kawasan minapolitan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sehingga dapat berkembang menjadi sebuah Kota Perikanan berbasis sumber daya perikanan. Pengembangan ekonomi kelautan akan berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah (Manik *et al.*, 2019) sehingga mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulistiyanti & Wahyudi, 2015). Kawasan minapolitan Kabupaten Tangerang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2010), dan dikuatkan melalui tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, dan dipertegas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang (Bupati Tangerang, 2011).

Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Tangerang dapat dilakukan dengan fokus pada pemanfaatan potensi perikanan khususnya perikanan budidaya tambak, Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kabupaten Tangerang yang ditetapkan sebagai Kawasan minapolitan sampai saat ini mengingat potensi ini belum dilakukan dikelola secara optimal. Data menyebutkan bahwa produktivitas perikanan budidaya di Kabupaten Tangerang masih jauh di bawah produktivitas Kabupaten Serang (11,8 Ton/Ha) dan Kota Cilegon (68,75 Ton/Ha), selain itu sektor perikanan masih terfokus pada kegiatan primer (di hulu) nya saja, dan jumlah unit pengolahan ikan di Kabupaten Tangerang sebesar 246 unit, masih kalah jauh dari Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 394 unit (BPS Provinsi Banten, 2018). Lebih lanjut Selain itu berdasarkan (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2017) tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), untuk WPPNRI 712 dimana wilayah pesisir Kabupaten Tangerang masuk didalamnya, menunjukkan kondisi yang sudah *fully-exploited*, sehingga pengembangan sektor perikanan tangkap di wilayah ini relatif terbatas.

Secara lokal, pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang yang belum optimal tersebut berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir tersebut. Dalam konstelasi wilayah Kabupaten Tangerang, terjadi kesenjangan wilayah antara wilayah pesisir Kabupaten Tangerang dengan wilayah bagian lainnya di Kabupaten Tangerang, khususnya di bagian selatan meliputi Kecamatan Balaraja, Cikupa, dan Curug. Indikasi terjadinya ketimpangan dapat dilihat dari sebaran penduduk miskin di Kabupaten Tangerang, dimana jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang mencapai 33,57% dari total penduduk miskin di Kabupaten Tangerang (BPS Provinsi Banten, 2018). Sebagai upaya untuk menciptakan percepatan pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, maka dirasa perlu untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang ada melalui pendekatan minapolitan berbasis budidaya tambak.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep dan strategi percepatan pembangunan pengembangan Kawasan Minapolitan di wilayah pesisir melalui pendekatan minapolitan Kabupaten Tangerang dengan mengidentifikasi analisis potensi yang dapat dikembangkan dalam mengurangi ketimpangan antara wilayah pesisir dan wilayah lainnya sumber daya perikanan khususnya budidaya tambak, dan mengidentifikasi faktor utama percepatan pengembangan Kawasan pembangunan melalui Minapolitan di wilayah pesisir, sertadan menyusun konsep pengembangan Kawasan minapolitan di wilayah pesisir, yang mencakup pentahapan pengembangan, kelembagaan pengelola Kawasan Minapolitan, dan perencanaan berbasis budidaya tambak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode analisis, yaitu metode analisis deskriptif,

analisis LQ dan analisis *Shift share*, metode analisis regresi berganda, SPSS, Metode Hayami, indeks sentralitas, dan *overlay* peta. Tiap metode digunakan untuk analisis yang berbeda-beda, dimana hasilnya dapat dijadikan acuan dalam memformulasikan konsep dan strategi percepatan akselerasi pembangunan pengembangan Kawasan minapolitan dengan pendekatan minapolitan berbasis budidaya tambak. Dengan pendekatan ini, diharapkan kapasitas produksi untuk kegiatan primer dapat ditingkatkan, kegiatan hulu hingga hilir di Kabupaten Tangerang dapat lebih berkembang, sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang yang meliputi Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga, dan Kosambi. Penelitian dimulai pada bulan Maret 2020 hingga September 2021. Menggunakan berbagai metode analisis diantaranya analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Tangerang, yaitu antara wilayah pesisir dan bukan *non* pesisir. Metode analisis deskriptif untuk mengidentifikasi ketimpangan dilakukan dengan membandingkan proporsi penduduk miskin di kedua wilayah (wilayah pesisir dan non pesisir) di Kabupaten Tangerang. Selain itu, juga digunakan untuk mengidentifikasi pemenuhan syarat pengembangan minapolitan di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang dengan membandingkan potensi dan kapasitas yang dimiliki wilayah pesisir Kabupaten Tangerang dengan persyaratan serta ketentuan teknis Kawasan Minapolitan.

Metode LQ dapat digunakan untuk mengetahui komoditas unggulan perikanan laut (Ridwan *et al.*, 2019). Indikator yang digunakan adalah komoditas perikanan di Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang. Dengan metode LQ, maka dapat diidentifikasi potensi unggulan di pesisir Kabupaten Tangerang yang dapat menjadi faktor kunci pembangunan wilayah, yang diidentifikasi nilai $LQ > 1$ (Manullang *et al.*, 2018).

$$LQ = (-Vis/Vs) / (Vir/Vr) \dots\dots\dots 1)$$

dimana,

Vis = komoditas perikanan tertentu di Kabupaten Tangerang

Vs = komoditas perikanan total di Kabupaten Tangerang

Vir = komoditas perikanan tertentu di Provinsi Banten

Vs = komoditas perikanan total di Provinsi Banten

Metode *shift share* atau sering disebut juga metode analisis pergeseran dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan kelautan yang akan dikembangkan (Wahdaniyah *et al.*, 2018). Metode analisa pergeseran ini terdiri dari:

National Share, dengan rumus sebagai berikut:

$$NS = ((Entn/Ent0) \times ERito) - Erito \dots\dots\dots 2)$$

Dari hasil perhitungan, jika Nilai NS(+) = nilai positif artinya peran Provinsi Banten dalam pertumbuhan sektor di Kabupaten Tangerang bernilai positif, Nilai NS(-) = nilai negatif artinya peran Provinsi Banten dalam pertumbuhan sektor di Kabupaten Tangerang bernilai negatif.

Proporsional Shift, dengan rumus sebagai berikut:

$$PS = Eritox(Enitn/Enit0) - (Entn/Ent0) \dots\dots\dots 3)$$

Dari hasil perhitungan, bila, Nilai PS(+) = nilai positif artinya Kabupaten Tangerang berspesialisasi pada sektor yang pada level Provinsi Banten tumbuh lebih cepat, Nilai PS(-) = nilai negatif artinya Kabupaten Tangerang berspesialisasi pada sektor yang pada level Provinsi Banten tumbuh lebih lambat.

Diferensial Shift, dengan rumus sebagai berikut:

$$DS = Eritn - ((Enitn/Enit0) \times Erito) \dots\dots\dots 4)$$

Dari hasil perhitungan, bila, Nilai DS(+) = nilai positif artinya pertumbuhan sektor di Kabupaten Tangerang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan sektor di Provinsi Banten, Nilai DS(-) = nilai negatif artinya pertumbuhan sektor di Kabupaten Tangerang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor di Provinsi Banten.

Adapun tiap variabel adalah:

NS : *National Share*

PS : *Proportional Shift*

DS : *Differential Shift*

Entn : total PDRB di Provinsi Banten pada tahun n

Ent0 : total PDRB di Provinsi Banten pada tahun 0

Enitn : nilai sektor i di Provinsi Banten pada tahun n

Enit0 : nilai sektor i di Provinsi Banten pada tahun 0

Eritn : nilai sektor i di Kabupaten Tangerang pada tahun n

Erit0 : nilai sektor i di Kabupaten Tangerang pada Tahun 0

Metode analisis regresi berganda digunakan untuk menghitung pengaruh faktor produksi perikanan terhadap jumlah produksi dari kegiatan perikanan, dengan menggunakan aplikasi SPSS. Analisis regresi berganda digunakan karena terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi proses produksi, dimana fungsi produksi utama pada perikanan budidaya yang bersifat ekstensif adalah fungsi input dan output (Oddsson, 2020). Selanjutnya (Sumartin, 2017), menyebutkan beberapa faktor produksi perikanan budidaya, yaitu: luas kolam/tambak, pupuk, kapur, benih, pakan, obat-obatan dan probiotik, tenaga kerja.

Metode analisis Indeks Sentralitas digunakan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, dalam hal ini kawasan minapolitan. Pusat-pusat pelayanan ini perlu dikembangkan dalam konsep kutub-kutub pertumbuhan diharapkan terjadinya penetesan (*trickle down effect*) dari kutub

pusat pertumbuhan ke wilayah hinterland-nya. Teori pusat pertumbuhan ini muncul dari pemikiran Perroux pada tahun 1950 dengan teori sektor atau wilayah pertumbuhan yang tidak seimbang, yang dikenal dengan teori pembangunan terpolarisasi atau teori kutub pertumbuhan (Emalia & Farida, 2018). Rumus Indeks Sentralisasi:

$$C = t/T \dots\dots\dots 5)$$

Keterangan,
 C : Bobot Fungsi,
 t : Nilai sentralitas total, yaitu 100,
 T : Jumlah total fungsi.

Angka nilai bobot ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi keberadaan suatu fungsi akan semakin kecil nilai bobotnya, sebaliknya semakin rendah frekuensi keberadaan suatu fungsi, semakin tinggi nilai bobotnya.

Metode analisis Hayami adalah metode yang telah digunakan untuk menganalisis nilai tambah pada

Tabel 1. Luasan sebaran sedimentasi
Table 1. Extent of Sedimentation Distribution

No	Variabel	Nilai
Output, Input, Harga		
1	Output (kg/bulan)	A
2	Bahan baku (kg/bulan)	B
3	Tenaga kerja (HOK/bulan)	C
4	Faktor konversi (kg)	D = A/B
5	Koefisien tenaga kerja (HOK/kg)	E = C/B
6	Harga output (Rp/kg)	F
7	Upah tenaga kerja (Rp/HOK)	G
Pendapatan dan Keuntungan		
8	Harga bahan baku (Rp/kg)	H
9	Sumbangan input lain (Rp/kg bahan baku)	I
10	Nilai output (Rp/kg)	J = D x F
11	a. Nilai tambah (Rp/kg)	K = J - I - H
	b. Rasio nilai tambah (%)	L% = (K/J) x 100%
12	a. Imbalan tenaga kerja (Rp/kg)	M = E x G
	b. Bagian tenaga kerja (%)	N% = (M/K) x 100%
13	a. Keuntungan (Rp/kg)	O = K - M
	b. Tingkat keuntungan (%)	P% = (O/K) x 100%
Balas Jasa untuk Faktor Produksi		
14	Margin (Rp/kg)	Q = J - H
	a. Keuntungan (%)	R = O/Q x 100%
	b. Tenaga kerja (%)	S = M/Q x 100%
	c. Input lain (%)	T = I/Q x 100%

Sumber : (Hutauruk, Tarigan, Siahaan, & Sitohang, 2018).

subsistem pengolahan ikan (Aji *et al.*, 2018). Metode Hayami dilakukan dengan menggunakan prosedur yang terdapat dalam Tabel 1.

Metode *overlay* peta dilakukan untuk menganalisis kesesuaian lahan budidaya tambak di kawasan pesisir. Dengan analisis ini akan diketahui seberapa besar lahan di pesisir yang dapat digunakan untuk perikanan budidaya tambak. *Overlay* merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. Secara sederhana *overlay* disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik. Metode *overlay* ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi ArcGIS.

Analisis kesesuaian lahan untuk budidaya tambak dilakukan untuk mengidentifikasi apakah keberadaan lahan tambak memiliki daya dukung yang baik atau tidak. Identifikasi kesesuaian lahan ini penting, demi keberlanjutan produksi tambak pada kawasan minapolitan. Adapun parameter kesesuaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelerengan, tekstur tanah, curah hujan, jarak dari garis pantai dan tutupan lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketimpangan Wilayah

Secara sosial, masih ditemui permasalahan ketimpangan wilayah pesisir dibandingkan dengan wilayah *non* pesisir, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan super struktural (Kristiyanti, 2016). Kebijakan pengurangan ketimpangan cenderung menjadi relatif lebih efektif untuk pengurangan kemiskinan daripada kebijakan yang mendorong pertumbuhan (Ayub, 2013), dengan demikian penilaian ketimpangan bisa dilihat dari perbedaan tingkat kemiskinan antar wilayah. Hasil analisis ketimpangan wilayah menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengelompokan dan perhitungan proporsi, dapat diidentifikasi keluarga miskin di wilayah pesisir memiliki proporsi 17,8% terhadap total jumlah keluarga, lebih besar daripada proporsi di wilayah *non* pesisir yaitu 8,7%.

Analisis Sektor Basis dan Potensi Komoditas Perikanan Unggulan

Berdasarkan hasil perhitungan *shift share*, dapat diidentifikasi bahwa subsektor perikanan yang tergabung dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan. Aktifitas primer perikanan dibedakan kedalam aktifitas penangkapan dan budidaya (Adhhapsari *et al.*, 2014), yang dalam konteks wilayah studi adalah perikanan budidaya.

Sementara, berdasarkan hasil analisis indeks LQ, dapat diketahui bahwa usaha perikanan yang potensial untuk dijadikan unggulan adalah usaha perikanan budidaya tambak.

Identifikasi komoditas perikanan tambak yang dapat dijadikan unggulan/memiliki nilai kompetitif dilakukan dengan membandingkan antara produksi usaha perikanan di Kabupaten Tangerang dengan produksi usaha perikanan di Provinsi Banten. Data yang digunakan adalah data Kabupaten Tangerang Dalam Angka dan Provinsi Banten Dalam Angka Tahun 2018. Berdasarkan analisis potensi komoditas perikanan unggulan tersebut, ditemukan bahwa usaha perikanan yang potensial untuk dijadikan unggulan adalah usaha perikanan budidaya tambak, sementara komoditas perikanan tambak yang potensial untuk dijadikan unggulan adalah komoditas bandeng dan mujair.

Analisis Faktor Produksi dan Nilai Tambah Usaha Perikanan Serta Pendapatan Masyarakat

Analisis faktor peningkatan produksi perikanan untuk produksi budidaya digunakan variabel-variabel sebagai berikut.

- Y : produksi ikan bandeng, ikan mujair
- X1 : benih
- X2 : pakan
- X3 : pupuk
- X4 : tenaga kerja
- X5 : luas lahan

Hasil persamaan regresi linear untuk produksi budidaya ikan bandeng:

$$Y = -0,640 + 0,423 X1 + 0,242 X2 + 0,034 X3 + 0,165 X4 + 0,017 X5$$

Penjelasan dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Variabel benih dengan koefisien 0,423, yang artinya adanya peningkatan jumlah bibit 1 kg akan meningkatkan produksi 0,423 kg per masa panen, (2) Variabel pakan dengan koefisien 0,242, yang artinya adanya peningkatan jumlah pakan 1 kg akan meningkatkan produksi 0,242 kg per masa panen, (3) Variabel pupuk dengan koefisien 0,034, yang artinya adanya peningkatan jumlah pupuk 1 kg akan meningkatkan produksi 0,034 kg per masa panen, (4) Variabel tenaga kerja dengan koefisien 0,165, yang artinya adanya peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 orang hari akan meningkatkan produksi 0,165 kg per masa panen, (5) Variabel luas lahan dengan koefisien 0,017, yang artinya adanya peningkatan luas lahan 1 Ha akan meningkatkan produksi 0,017 kg per

masa panen.

Hasil persamaan regresi linear untuk produksi budidaya ikan mujair:

$$Y = 922,070 + 3,85 X_1 + 0,448 X_2 + 1,255 X_3 + 2,955 X_4 + 2874,37 X_5$$

Penjelasan dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Variabel benih dengan koefisien 3,85, yang artinya adanya peningkatan jumlah bibit 1 kg akan meningkatkan produksi 3,85 kg per masa panen, (2) Variabel pakan dengan koefisien 0,448, yang artinya adanya peningkatan jumlah pakan 1 kg akan meningkatkan produksi 0,448 kg per masa panen, (3) Variabel pupuk dengan koefisien 1,255, yang artinya adanya peningkatan jumlah pupuk 1 kg akan meningkatkan produksi 1,255 kg per masa panen, (4) Variabel tenaga kerja dengan koefisien 2,955, yang artinya adanya peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 1 orang hari akan meningkatkan produksi 2,955 kg per masa panen, (5) Variabel luas lahan dengan koefisien 2.874,37, yang artinya adanya peningkatan luas lahan 1 Ha akan meningkatkan produksi 2.874,37 kg per masa panen.

Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut di antaranya adalah efisiensi konversi sumber daya menjadi produk yang bermanfaat sehingga memberi nilai tambah (Eilsen, 2020). Dalam hal ini, hasil analisis peningkatan nilai tambah produksi perikanan menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) pengolahan hasil perikanan yang ditemukan dalam lokasi penelitian, yaitu: pengasapan/pemanggangan ikan bandeng menjadi sate bandeng, pemindangan bandeng, dan penggaraman/pengeringan ikan mujair menjadi ikan asin. Dari ketiga usaha tersebut, yang memberi nilai tambah paling tinggi adalah usaha sate bandeng dengan nilai tambah usaha sebesar Rp. 48.200/Kg.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi bahwa nilai tambah dari usaha sate bandeng adalah Rp. 48.200/Kg atau mencapai 53,56% dari harga sate bandeng. Dari nilai tambah tersebut, keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha adalah Rp. 40.325/Kg, sisanya untuk tenaga biaya tenaga kerja. Jika ditinjau dari marginnya, maka keuntungan usaha adalah 56,80%. Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi bahwa nilai tambah dari usaha pindang bandeng adalah Rp. 7.000/Kg atau mencapai 23,93% dari harga pindang bandeng. Dari nilai tambah tersebut, keuntungan

yang dapat diperoleh dari usaha adalah Rp. 5.950/Kg, sisanya untuk tenaga biaya tenaga kerja. Jika ditinjau dari marginnya, maka keuntungan usaha adalah 58%. Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi bahwa nilai tambah dari usaha pindang bandeng adalah Rp. 18.500/Kg atau mencapai 48,05% dari harga ikan asin mujair. Dari nilai tambah tersebut, keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha adalah Rp. 10.500/Kg, sisanya untuk tenaga biaya tenaga kerja. Jika ditinjau dari marginnya, maka keuntungan usaha adalah 48,44%.

Pendapatan masyarakat pembudidaya ikan diperoleh dari hasil penjualan ikan segar dan dari hasil pengolahan. Dalam konteks produksi ikan segar, peningkatan produksi dilakukan dengan menambah kapasitas pada variabel benih, pakan, pupuk, tenaga kerja melalui program pengembangan kawasan minapolitan, karena adanya fasilitasi program peningkatan produksi. Sementara terkait dengan luas tambak/kolam juga masih dapat dioptimalkan, mengingat masih cukup banyak lahan tersedia. Dalam konteks pengolahan hasil ikan, beberapa pengolahan hasil ikan yang ditemui, baik sate bandeng, pindang bandeng, dan ikan asin mujair, menunjukkan nilai tambah usaha perikanan berkisar antara 20% - 50%.

Analisis Pengembangan Kawasan Minapolitan Kesesuaian Tata Ruang

Berdasarkan analisis rencana struktur ruang sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Tangerang, dilihat dari 7 (tujuh) pusat pelayanan yang ada di wilayah studi, maka Kecamatan Teluknaga yang memiliki fungsi pelayanan tertinggi, yaitu sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang akan dipromosikan (PKWp) untuk melayani skala provinsi atau kabupaten. Selanjutnya terdapat 6 (enam) pusat pelayanan yang melayani skala beberapa kecamatan (PKL dan PKLp) serta melayani skala kecamatan/internal kecamatan yaitu PPK. Selain itu dari tujuh pusat pelayanan di wilayah studi, sudah terdapat arahan fungsi pusat kegiatan perikanan. Dengan demikian maka secara fungsi berkesesuaian dengan konsep pengembangan kawasan minapolitan yang berbasis kegiatan perikanan.

Untuk ketersediaan pasokan listrik, merujuk pada rencana jaringan listrik, maka seluruh kecamatan sudah tersedia atau tersambung dengan jaringan listrik. Bahkan saat ini sudah terdapat PLTU Lontar di Kecamatan Kemiri dengan kapasitas 3x315 MW. Jaringan listrik berperan penting dalam pengembangan kawasan minapolitan, khususnya untuk *cold storage* di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) maupun untuk

kegiatan pengolahan perikanan. Sementara untuk analisis ketersediaan air bersih, diketahui bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang desa-desanya didominasi pelayanan air bersih *non* perpipaan, seperti di Kecamatan Kemiri, Sukadiri, Pakuhaji, dan Kosambi. Di dalam RTRW Kabupaten Tangerang, untuk Kecamatan Pakuhaji sudah direncanakan untuk dikembangkan IPAM Pakuhaji dengan memanfaatkan Sungai Cisadane.

Sistem persampahan telah diarahkan penyediaan TPST Jatiwaringin di Kecamatan Mauk. Namun saat ini tempat pengelolaan sampah tersebut telah berkembang menjadi TPA Jatiwaringin yang melayani pemrosesan sampah di Kabupaten Tangerang, tidak hanya untuk Kecamatan Mauk dan sekitarnya. Sementara berdasarkan kajian peta pola ruang, dapat diidentifikasi terdapat peruntukan ruang tambak seluas 1.511,56 Ha di wilayah studi, yang tersebar di 5 kecamatan (Kronjo, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga, dan Kosambi).

Analisis berdasarkan arahan rencana pola ruang, yang terkait dengan pengembangan kawasan minapolitan adalah pola ruang untuk peruntukan ruang tambak, dimana dari hasil identifikasi diperoleh luasan sebesar 1.511,56 Ha ditemukan di wilayah studi dengan rincian di Kecamatan Kronjo sebesar 709,64 Ha, Kecamatan Mauk 37,75 Ha, Kecamatan Pakuhaji 481,94 Ha, Kecamatan Teluknaga 167,17 Ha dan Kecamatan Kosambi 115,16 Ha.

Pusat Pelayanan Kawasan Minapolitan

Berdasarkan hasil analisis pembobotan, dapat diidentifikasi terdapat 2 (dua) pusat minapolitan, yaitu di Kecamatan Kronjo dan Teluknaga, sementara 5 (lima) kecamatan lainnya dapat diarahkan menjadi sub kawasan produksi. Kedudukan pusat minapolitan

dalam lingkup kawasan minapolitan diantaranya sebagai: 1) Pusat koleksi komoditas perikanan sebagai bahan mentah industri, 2) Kota perdagangan yang berorientasi ekspor, dan 3) Pusat berbagai kegiatan (*final manufacturing*) industri perikanan (*packing*) stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditi. Sementara itu kedudukan sub kawasan produksi dalam lingkup Kawasan Minapolitan di antaranya sebagai: pusat produksi unggulan daerah yang ditandai dengan adanya input produksi untuk pengembangan hasil tangkap secara berkelanjutan, dan pusat pemasok hasil produksi perikanan untuk mendukung kinerja sentra produksi pengolahan dan pemasaran untuk merealisasi target dan sasaran produksi kelautan dan perikanan.

Daya Dukung Lahan Budidaya Tambak

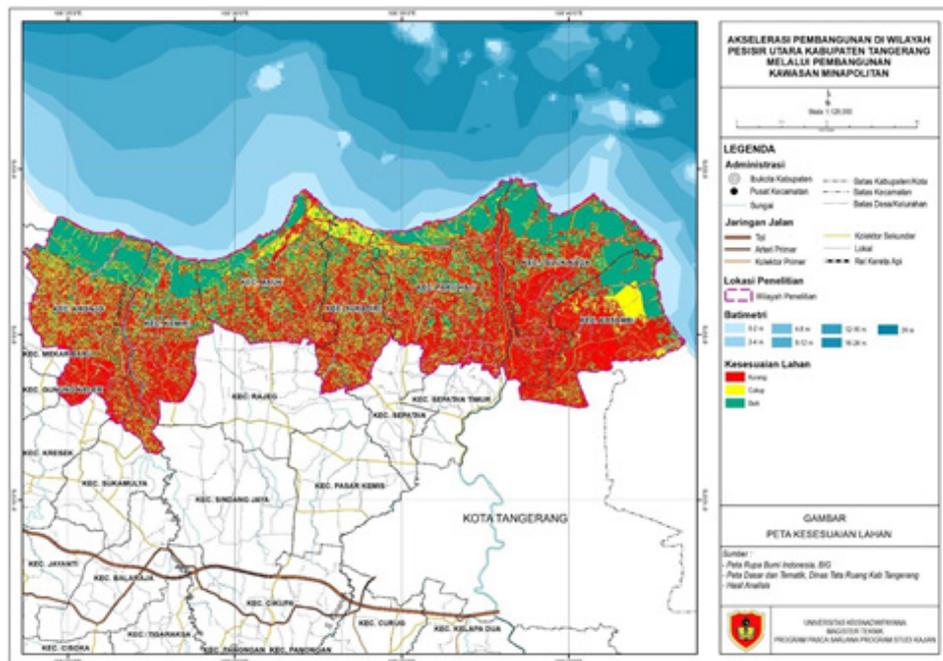
Berdasarkan hasil pemetaan terhadap parameter kesesuaian lahan tambak, selanjutnya dilakukan *overlay* peta seluruh parameter, sehingga didapat hasil analisis kesesuaian lahan tambak sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Jika hasil analisis kesesuaian lahan tersebut dibandingkan dengan kondisi lahan usaha perikanan, maka masih terdapat lahan potensial yang belum termanfaatkan. Kondisi lahan usaha yang termanfaatkan untuk budidaya tambak adalah 3.983,65 Ha, sementara potensi berdasarkan analisis kesesuaian lahan adalah 8.215,43 Ha (Gambar 1).

Dalam hal ini, pemanfaatan lahan harus memperhatikan tingkat efisiensi dengan penerapan teknologi. Efisiensi bisa secara sederhana didefinisikan sebagai rasio dari *output* ke *input*. *Output* yang lebih per unit input mencerminkan efisiensi yang relatif lebih besar (Sukiyono & Romdhon, 2016).

Tabel 2. Hasil analisis kesesuaian lahan budidaya tambak di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang
Table 2. The result of the analysis of the suitability of pond land in the coastal area of Tangerang Regency

Kecamatan	Daya Dukung Lahan Tambak (Ha)		
	Baik	Cukup	Kurang
Kronjo	1.530,64	1.152,18	2.150,76
Mauk	1.303,69	1.161,32	1.658,87
Kemiri	922,42	762,66	1.749,93
Sukadiri	552,40	854,49	1.415,69
Pakuhaji	1.451,53	1.237,28	2.643,76
Teluknaga	1.837,55	701,18	2.330,87
Kosambi	727,80	812,88	2.086,27
Jumlah	8.326,03	6.681,98	14.036,17



Gambar 1. Peta kKesesuaian lahan budi daya tambak di Wilayah Pesisir Kabupaten Tangerang.
 Figure 1. Map of suitability of pond land in the Coastal Area of Tangerang Regency.

Konsep Pengembangan Minapolitan Pentahapan Pengembangan

Pengembangan kawasan minapolitan, terdapat beberapa pentahapan pengembangan yang perlu dilakukan, mulai dari penetapan kawasan minapolitan hingga sistem pendanaan. Pengembangan kawasan minapolitan harus memadukan seluruh sektor perikanan yang ada di wilayah penelitian, namun dalam penelitian ini, kajian diarahkan pada subsektor perikanan dan komoditas perikanan yang utama berdasarkan hasil kajian.

Konsep lingkup kawasan minapolitan dalam penelitian ini, merupakan indikasi awal wilayah yang dapat menjadi bagian dari kawasan minapolitan. Berdasarkan identifikasi kondisi eksisting, dari 7 (tujuh) kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, keseluruhan kecamatan memiliki lahan usaha perikanan. Dengan demikian, maka ketujuh kecamatan terindikasi dapat masuk menjadi bagian dari Kawasan Minapolitan.

Hasil analisis pusat pelayanan kawasan minapolitan, telah diidentifikasi bahwa pusat minapolitan dapat diarahkan ke Kecamatan Kronjo dan Teluknaga, sementara lima kecamatan lainnya menjadi sub kawasan produksi. Hal ini pun sudah berkesesuaian dengan arahan pusat perkotaan dalam RTRW Kabupaten Tangerang, di mana Teluknaga menjadi PKWp dan Kecamatan Kronjo menjadi PKL. Perlu diketahui bahwa PKWp adalah PKL yang dipromosikan menjadi PKW.

Konsep subsektor dan komoditas unggulan perikanan yang dapat dikembangkan pada wilayah studi sebenarnya cukup beragam, mulai dari perikanan tangkap maupun budidaya. Perikanan tangkap di laut memang terbatas, karena terindikasi sudah *over-exploited*, sehingga dalam penelitian ini tidak menjadi fokus kajian, namun bukan berarti tidak dapat dikembangkan. Perikanan tangkap di perairan umum juga masih dapat dikembangkan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil analisis, maka subsektor yang menjadi unggulan adalah subsektor perikanan budidaya di tambak. Pengembangan kawasan minapolitan tidak terlepas dari komoditas unggulan yang dikembangkan. Komoditas unggulan harus berkesesuaian dengan subsektor perikanan yang dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis, komoditas unggulan untuk perikanan budidaya tambak adalah bandeng dan mujair.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa sarana dan prasarana yang masih belum cukup memadai dalam mendukung Kawasan Minapolitan, sehingga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Diantaranya adalah, (1) Fasilitas di PPI, dimana berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa fasilitas yang perlu dibenahi atau dilengkapi di masing-masing PPI adalah sebagai berikut: PPI Kronjo: Dermaga, Kolam Pelabuhan, Breakwater, Jalan penghubung, Mercusuar, Depot Es, Tempat Penjemuran Ikan, dan MCK, PPI Tanjung Pasir: Dermaga, Kolam Pelabuhan, Mercusuar, Depot Es, Tempat Pengolahan Ikan, Tempat Penjemuran Ikan, dan MCK, dan PPI

Cituis: Dermaga, Kolam Pelabuhan, Breakwater, Mercusuar, Depot Es, Tempat Pengolahan Ikan, Tempat Penjemuran Ikan, Kantor Pelabuhan, Balai Pertemuan Nelayan, Pos Jaga, dan MCK. (2) Jaringan Air Bersih, dimana berdasarkan kajian, masih terdapat beberapa kecamatan yang desa-desanya didominasi pelayanan air bersih *non* perpipaan, seperti di Kecamatan Kemiri, Sukadiri, Pakuhaji, dan Kosambi. Oleh karena itu perlunya peningkatan pelayanan PDAM Tirta Kertaharja. Selain peningkatan pelayanan PDAM, juga perlu pembangunan IPAM Pakuhaji, sebagaimana diarahkan dalam RTRW Kabupaten Tangerang.

Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan minapolitan merupakan faktor penting lainnya. Kualitas SDM dalam pengembangan Kawasan Minapolitan sangat berpengaruh, hal ini dikarenakan tanpa adanya dukungan kualitas SDM pengembangan Kawasan Minapolitan akan lambat. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja nelayan pada tingkat signifikansi 95% (Asmara *et al.*, 2018). Dalam penyiapan SDM ini, Pemerintah Daerah sangat berperan penting memfasilitasi pelatihan dan penyuluhan. Dalam kondisi tertentu, juga dapat dibangun kelembagaan tersendiri, yang tugasnya memberikan pendampingan kepada masyarakat pembudidaya.

Konsep pengembangan subsistem hulu hingga hilir, menunjukkan bahwa program-program yang dikembangkan dalam peningkatan produksi perlu disesuaikan dengan variabel-variabel utama yang mempengaruhi hasil produksi perikanan. Berdasarkan analisis sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi produksi usaha perikanan budidaya, secara berurutan yakni : (1) Usaha Tambak Bandeng, meliputi: benih, pakan, tenaga kerja, pupuk dan luas lahan, (2) Usaha Tambak Mujair, meliputi: luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pakan.

Kelembagaan Pengelola Kawasan Minapolitan

Pengelolaan kawasan minapolitan perlu dikembangkan suatu forum atau focal point yang berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinir pembangunan kawasan minapolitan. Oleh karena itu diharapkan Pemda dapat menginisiasi terbentuknya Pokja Minapolitan dan wadah sekretariat Pokja untuk membantu melaksanakan peran Pemda dalam pengembangan kawasan minapolitan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Pokja diinisiasi oleh Pemda dan terdiri dari instansi terkait seperti Dinas Perikanan, Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi, Perbankan, dan Camat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa usaha perikanan yang potensial untuk dijadikan unggulan adalah usaha perikanan budidaya tambak, dengan komoditas utamanya adalah bandeng dan mujair. Kegiatan perikanan budidaya tambak memiliki kapasitas rata-rata 17.016 ton, dengan lahan pemanfaatan eksisting seluas 3.926 Ha. Merujuk hasil analisis kesesuaian lahan, maka potensi ini masih dapat dikembangkan mengingat lahan yang sesuai untuk kegiatan budidaya tambak mencapai 8.215,43 Ha. Percepatan pembangunan wilayah pesisir melalui minapolitan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah dengan kegiatan sekunder dan tersier. Faktor produksi budidaya tambak bandeng yang utama adalah benih dan pakan, sedangkan faktor produksi budidaya tambak mujair yang utama adalah luas lahan tambak dan benih. Dalam hal peningkatan nilai tambah, usaha pengolahan ikan yang memberikan nilai tambah optimal adalah usaha sate bandeng dengan nilai tambah usaha sebesar Rp. 48.200/Kg. Kegiatan budidaya harus memperhatikan daya dukung lahan dan kriteria kesesuaian lahan budidaya serta harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu sarana prasarana pendukung kegiatan budidaya seperti ketersediaan PPI, lembaga keuangan, dan sarana prasarana wilayah lainnya juga menjadi faktor penentu keberhasilan minapolitan di Kabupaten Tangerang. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa keluarga miskin di wilayah pesisir memiliki proporsi 17,8% terhadap total jumlah keluarga, lebih besar daripada proporsi di wilayah non-pesisir yaitu 8,7%. Konsep pengembangan minapolitan merekomendasikan adanya tujuh kecamatan yang bisa menjadi bagian kawasan minapolitan, dengan pusat minapolitan diarahkan di Kecamatan Kronjo dan Teluknaga, subsektor yang menjadi unggulan adalah subsektor perikanan budidaya tambak dengan komoditas unggulan adalah bandeng dan mujair. Beberapa sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung Kawasan Minapolitan, demikian pula SDM sehingga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Pengembangan subsistem hulu hingga hilir, menunjukkan bahwa program-program yang dikembangkan dalam peningkatan produksi perlu disesuaikan dengan variabel-variabel utama yang mempengaruhi produksi budidaya tambak. Berdasarkan hasil penelitian maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dapat

menerapkan konsep pengembangan minapolitan di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang dalam rangka percepatan pembangunan wilayah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Program Studi Magister Teknik Kajian Pembangunan Perkotaan dan Wilayah, Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana atas bantuan dan fasilitas yang diberikan. Penulis yang merupakan kontributor utama adalah Kasman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiharsari, W., Semedi, B., & Mahmudi, M. (2014). Perencanaan Pengembangan Wilayah Kawasan Minapolitan Budidaya di Gandusari Kabupaten Blitar. *J-Pal*, 5(2), 7-14.
- Aji, V. P., Yudhistira, R., & Sutopo, W. (2018). Analisis Nilai Tambah Pengolahan Ikan Lemuru Menggunakan Metode Hayami. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 17(1), 56-61. <https://doi.org/10.23917/jiti.v17i1.5611>
- Asmara, O., Irnad, I., & Hartono, D. (2018). Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Kesadaran Lingkungan Dan Modal Sosial Terhadap Kinerja Nelayan Lobster Di Kecamatan Bungo Mas Kabupaten Bengkulu Selatan. *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 7(2), 53-60. <https://doi.org/10.31186/naturalis.7.2.6019>
- Ayub, M. (2013). Poverty and Inequality. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 5(3), 329-346. <https://doi.org/10.1177/0974910113505796>
- BPS Provinsi Banten. (2018). Provinsi Banten Dalam Angka 2018. Banten: © BPS Provinsi Banten.
- Bupati Tangerang. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (2011).
- Eilsen, A. (2020). Salfjord AS: A qualitative case study about the competitive advantages from Tjeldbergodden. Molde University College.
- Emalia, Z., & Farida, I. (2018). Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), 61-74. <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4100>
- Hutauruk, J., Tarigan, K., Siahaan, S. D., & Sitohang, M. (2018). Hayami method application in the evaluation process of farmers who produce wet and dry corn seeds. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci*, 205, 012009. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/205/1/012009>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2010). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2017). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/Kepmen-Kp/2017 Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/Kepmen-Kp/2017.
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pebedkatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). “Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016, Semarang, Indonesia, July 2016. Universitas Stikubank. (pp. 752-760). Retrieved from <http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4264/1270>
- Manik, T., Iranita, I., Eryanto, H., & Sebayang, K. D. A. (2019). Development of Maritime Economy and Coastal Economy to Improve Competitiveness and Coastal Economic Growth in Riau Island Province. *Economic and Social of Fisheries and Marine Journal*, 6(2), 158-172. <https://doi.org/10.21776/ub.ecsofm.2019.006.02.04>
- Manullang, D. M. L., Rusgiyono, A., & Warsito, B. (2018). Analisis Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 Menggunakan Metode Location Quotient Dan Shift share. *Jurnal Gaussian*, 7(1), 1-10. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v7i1.26630>
- Oddsson, G. V. (2020). A definition of aquaculture

intensity based on production functions-the aquaculture production intensity scale (APIS). *Water*, 12(3), 765. <https://doi.org/10.3390/w12030765>

Ridwan, M., Kasmi, M., & Putri, A. R. S. (2019). Penentuan Komoditas Unggulan Perikanan Laut Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Data Statistik Tahun 2016. *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan*, 5(10), 98–105. <https://doi.org/10.20956/jipsp.v5i10.6203>

Sukiyono, K., & Romdhon, M. M. (2016). Efisiensi alokatif faktor produksi pada usaha perikanan tangkap di kota Bengkulu: kasus pada alat tangkap gill net. *Jurnal Saintek Perikanan*, 11(2), 99-104. <https://doi.org/10.14710/ijfst.11.2.99-104>

Sulistiyanti, & Wahyudi. (2015). Pengembangan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor Perikanan di Provinsi Jawa Timur. *Media Trend*, 10(2), 140-164. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v10i2.945>

Sumartin. (2017). Analisis Efisiensi Faktor Produksi Usaha Budidaya Ikan Bandeng (Chanos chanos) (Studi Kasus pada Alumni Peserta Pelatihan Budidaya Ikan di BPPP Banyuwangi). *Journal of Aquaculture Science*, 2(1), 43–60. <https://doi.org/10.31093/joas.v2i1.20>

Wahdaniyah, N., Jufriadi, J., & Surur, F. (2018). Strategi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2(1), 64. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.64-731>

